

## Membentuk Pendidikan Agama Islam Yang Berwawasan Plural

Sukman S

IAIN Sorong, Indonesia

sukmanstainsorong@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai konflik yang dilandasi oleh motif-motif keagamaan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana membentuk pendidikan agama Islam yang berwawasan pluralisme agama. Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik *content analysis*. Sumber data penelitian berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian di analisis dengan tiga langkah analisis; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor penyebab kegagalan pendidikan agama dalam menumbuhkan pluralisme yaitu: 1) penekanannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; 2) sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai “hiasan kurikulum” belakang yang dipandang sebelah mata; 3) kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama, dan 4) kurangnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain. Pendidikan agama Islam, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agama peserta didik, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Maka, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh tentang isu pluralitas. Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun bentuk kurikulum pendidikan agama berbasis pluralisme agama.

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama Islam, Pluralisme, Agama

## A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan ras (Soekarba, 2018). Keberagaman yang sejatinya menguatkan kohesi sosial kebangsaan, namun di tengah keberagaman, justru bangsa ini diperhadapkan dengan pelbagai tantangan terkait isu pluralisme agama itu sendiri, bahkan menjadi problematika (Wahid, 2016). Pluralisme bisa menjadi semacam “pra-kondisi”, bagi munculnya insabilitas, kekerasan, konflik, disintegrasi sosial, kekerasan, bahkan pembunuhan. Misalnya saja, banyak kejadian dan konflik berbau SARA di masa lalu. Misalnya dalam catatan Schulze (2002) tentang peristiwa Ambon, Poso, Sampit, Aceh sampai kasus dukun santet di Jawa Timur, semua ditengarai bersumber dari isu SARA, lebih khusus masalah agama sebagai faktor yang paling determinan. Fenomena yang paling mutakhir ialah bentrok antar pendukung partai berbasis agama yang pernah terjadi di beberapa daerah agama menjadikan anti keberagaman sebagai basis pergerakan mereka (Nuryanti, 2020). Hal ini menjadi penanda bahwa adanya kesadaran akan realitas plural tidak serta merta membuat masyarakat arif dalam menyikapinya.

Dengan demikian, merebaknya pelbagai isu-isu SARA pertanda bahwa pentingnya pemahaman tentang toleransi dan kesalingpahaman di tengah ancaman pluralisme agama. Di Indonesia, toleransi beragama merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dalam konstitusi (Ishak dkk., 2022). Maka sangat tidak mengherankan bila kita menyaksikan, betapa keras reaksi masyarakat Indonesia terhadap munculnya berbagai aliran dan pemikiran yang berpotensi merongrong semangat kebhinnekaan kita. Misalnya dengan gerakan-gerakan furifikasi Islam yang memiliki kecondongan menolak kebenaran diluar kelompoknya (Sutiyono, 2015). Termasuk kelompok liberal berkedok agama yang dalam banyak hal tiada lagi mengendahkan batas-batas normal dan sakralitas keagamaan. Meski tidak bisa dinafikan bahwa dalam dekade sebelumnya, negara telah sangat mendukung wacana Muslim liberal yang berorientasi pembangunan (Bruinessen, 2018).

Pada sisi yang lain, fenomena ini yang kemudian menjadikan gerakan Islam nasional yang mapan seperti Muhammadiyah dan NU untuk melakukan

refleksi ulang atas konsepsi keberagaman Indonesia yang selama ini dijalankan. Dengan demikian, adanya serentetan kerusuhan-kerusuhan yang berbau SARA di Indonesia, menunjukkan bahwa secara kolektif kita sebenarnya tidak mau belajar tentang bagaimana hidup secara bersama secara rukun. Bahkan, dapat dikatakan, agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga dan lembaga pendidikan tampaknya tidak berhasil menanamkan sikap toleransi inklusif dan tidak mampu mengajarkan untuk hidup bersama dalam masyarakat plural. Hasan dkk (2018) misalnya mencatat bahwa lembaga pendidikan justru menjadi lumbung tumbuhnya kelompok anti perbedaan atau eksklusif, bahkan literasi di sekolah dikuasainya.

Maka dapat dikatakan bahwa pluralisme agama tumbuh signifikan karena meningkatnya keragaman agama dan meningkatnya konflik agama, yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat kontemporer (Bano dkk., 2023). Oleh karena itu, di sinilah letak pentingnya sebuah ikhtiar menanamkan teologi pluralisme melalui pendidikan agama pada setiap satuan pendidikan. Sehingga, masyarakat Indonesia akan mampu membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas.

Diantaranya ialah dengan melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang berwawasan flural dengan mempertimbangkan pengembangan komponen-komponen, yang meliputi bahan /materi metode, peserta didik, media, lingkungan, dan sumber belajar maksud dan tujuan pendidikan pluralisme. Dengan begitu, akan dapat dijadikan sebagai jawaban atau solusi alternatif bagi keinginan untuk merespon persoalan-persoalan di atas. Sebab dalam pendidikannya, pemahaman Islam yang hendak dikembangkan oleh pendidikan berbasis pluralisme adalah pemahaman dan pemikiran yang bersifat inklusif, terbuka atas perbedaan, dan menghargainya.

Kajian tentang pendidikan agama Islam berwawasan plural sudah masif dilakukan. Berdasarkan penelusuran peneliti, berikut ini beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Nugroho (2019), Baidhaw (2007), dan Cohen-Zada & Elder (2018) misalnya, ia menjelaskan tentang internalisasi nilai-nilai toleransi pada lembaga pendidikan, dan menjadikannya sebagai alternatif. Studi ini sejalan dengan Moore (2009) dalam studinya, ia

mengemukakan tentang berbagai cara untuk menginternalisasikan Islam ke dalam kurikulum sekolah berbasis pluralisme. Begitu pula dengan Hakim & Ritonga (2018) dalam penelitiannya, ia mengungkapkan tentang pentingnya mereformulasi kurikulum pendidikan agama Islam dengan wawasan multikultural. Kendati demikian, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian pengembangan lebih lanjut. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi agenda reformulasi pendidikan melalui kurikulum berwawasan pluralisme pada lembaga pendidikan di Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan merupakan setiap usaha untuk membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmani sehingga ia memiliki ilmu, keterampilan, dan akhlak (Abuddin, 2013). Sejalan dengan UU Sisdiknas, No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan harapan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ia miliki, baik itu aspek pengendalian diri, agama, kepribadian, bangsa, negara dan lainnya. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya yang secara sistemik dan terukur kepada peserta didik untuk memahami dan menghayati seperti apa ajaran Islam itu (Indrianto, 2020).

Namun, di era globalisasi saat ini, pendidikan Islam diperhadapkan dengan pelbagai tantangan. Tolchah & Mu'ammam (2019) dalam studianya menyebutkan beberapa diantaranya; tantangan globalisasi di bidang kebudayaan, tantangan rendahnya modal sosial, tantangan struktural, dan tantangan budaya dan sumber daya manusia. Kendati demikian, bukan berarti belum berkontribusi terhadap pendidikan. Kontribusi pembentukan karakter berupa pembentukan karakter manusia yang baik, spiritual, dan militansi. Selain itu, berkontribusi terhadap sistem abadi dalam bentuk pembelajaran tradisional.

### **b. Pendidikan Berwawasan Pluralisme Agama**

Sudah barang tentu, setiap agama di dunia ini mengklaim paling benar dibanding dengan agama lainnya. Konsekuensi teologis ajaran seperti ini ialah lahirnya bentuk keyakinan yang disebut dengan istilah

“*doctrine of salvation*” yang artinya bahwa keselamatan hanya milik agama tertentu saja, dan menganggap pemeluk agama lain tidak selamat, atau pada jalan yang tidak benar (Thoha, 2005). Di tengah ketegangan munculnya pelbagai konflik atas nama agama, maka ajaran pluralisme agama dihadirkan dalam merespon munculnya keanekaragaman klaim absolut (*absolute-truth-claims*) yang berpotensi menjadi pemicu pelbagai aksi kekerasan atas nama agama. Amin Abdullah (dalam Ichwan & Muttaqin, 2013) menggambarkan fenomena ini dengan istilah yang serupa “*truth-claim*”.

Dengan demikian, kenyataan tersebut tidak bisa disangkal lagi sehingga lembaga pendidikan adalah salah satu yang diharapkan berperan dalam membentuk masyarakat berwawasan plural. Menurut Surikno (2015), ada lima metode Pendidikan Agama Islam berwawasan pluralisme agama; (1) metode keteladanan melalui habituasi. Artinya bahwa pendidikan yang dijalankan tidak saja berorientasi pada pengetahuan belaka, namun juga harus pada aspek keterampilan dan sikap peserta didik; (2) metode pemanenan, yakni dengan meminta siswa untuk merenungkan pengalaman mereka, serta menggali pengaruhnya terhadap diri mereka; (3) metode pedagogik dan dialogis dalam suatu kelompok belajar sehingga individu saling bekerja sama; dan (4) metode curah gagasan berupa teknik dalam menyelesaikan persoalan.

Namun, ada beberapa yang ditengarai menjadi penyebab kegagalan Pendidikan Agama Islam (PAI) selama ini dalam upaya menumbuhkan sikap menghargai pluralitas di sekolah (Muhaimin, 2006), yakni; pembelajaran PAI kurang menekankan pada upaya menginternalisasikan makna dan nilai kepada peserta didik, PAI dianggap selama tidak seiring dengan program dan/atau pelajaran yang lain (non agama), dan PAI dalam banyak pengalaman kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial, budaya atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai hidup dalam keseharian.

### C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Walliman (2021), penelitian kepustakaan merupakan rancangan penelitian yang menjadikan pelbagai literatur kepustakaan sebagai objek penelitian. Objek penelitian ini adalah kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam berwawasan plural. Selain itu, literatur lainnya berupa penelitian terdahulu yang relevan baik dalam bentuk penelitian disertasi, tesis, dan jurnal ilmiah. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni suatu model analisis yang digunakan dalam pemilahan teks yang bersifat mendalam (Lindgren dkk., 2020). Analisis tersebut dalam pelaksanaannya, peneliti meminjam model analisis interaktif Miles & Huberman (1994), yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Realitas Peran Pendidikan Agama*

Berangkat dari kesadaran adanya fenomena bahwa “satu Tuhan”, banyak agama merupakan fakta dan realitas yang dihadapi oleh manusia sekarang. Dengan realitas ini, maka manusia sekarang harus didorong menuju kesadaran bahwa pluralisme memang sungguh-sungguh fitrah kehidupan manusia. Mendorong setiap orang untuk dapat menghargai “keanekaragaman” adalah keniscayaan sehingga ia sangat penting segera dilakukan, terutama sekali di negara Indonesia yang pluralistik yang tersimbolisasi dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Dampak krisis multidimensional yang melandanya, menyebabkan bangsa Indonesia menghadapi berbagai problem sosial. Salah satu problem besar di mana peran agama menjadi sangat dipertanyakan adalah konflik etnis kultur dan religius, atau yang lebih dikenal dengan SARA yang tidak jarang dilandasi oleh motif keagamaan.

Sebenarnya masyarakat Indonesia telah lama akrab dengan diktum Bhinneka Tunggal Ika. Jika ditelisik dalam bentangan sejarah bangsa, sayangnya konsep ini telah mengalami pemelintiran makna dan bias interpretasi, terutama sepanjang pemerintahan Orde baru. Kebijakan sosial politik saat itu cenderung uniformistik, otoritarian sehingga tampaknya budaya milik kelompok dominanlah yang diajarkan dan disalurkan oleh sekolah dari

satu generasi kepada generasi lainnya. Bahkan pasca reformasi, salah kaprah akan keberagaman masih saja terjadi. Bhinneka Tunggal Ika kerap kali digunakan sebagai alat untuk menindas yang berbeda.

Sekolah pada saat itu juga ditengarai hanya merefleksikan dan menggemakan stereotip dan prasangka antar kelompok yang sudah terbentuk dan beredar dalam masyarakat, tidak berusaha menetralsir dan menghilangkannya. Bahkan, ada indikasi bahwa sekolah ikut mengembangkan prasangka dan mengestalasi ketegangan antar kelompok melalui perundang-undangan yang mengkota-kotakan penyampaian pendidikan agama, isi kurikulum yang etnosentris, dan dinamika relasi sosial antarsekolah yang segregatif (Khisbiyah, 2000).

Bukan tak mungkin segregasi sekolah berdasarkan pemeluk agama juga ikut memperuncing prasangka dan proses demonisasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, baik secara langsung maupun atau tidak langsung. Sebenarnya bukan hanya pada jaman Orde Baru, sejak jatuhnya rezim Soeharto, pluralisme dan keberagaman agama menghadapi pelbagai tantangan dengan lahirnya berbagai kelompok Islam yang berpotensi mengancam toleransi beragama (Qurtuby, 2020).

Padahal, menurut S. Hamid Hasan, “keanekaragaman sosial, budaya ekonomi, dan aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun demikian, keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik yang seharusnya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penentuan filsafat, teori, fisika pengembangan dokumen sosialisasi kurikulum dan pelaksanaan kurikulum, nampaknya belum dijadikan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan di negara kita (S. H. Hasan, 2000). Maka, akibatnya, wajar manakala terjadi kegagalan dalam pendidikannya (termasuk pendidikan agama), terutama sekali dalam menumbuhkan sikap-sikap untuk menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat.

Selain itu, Kautsar Azhari Noer dalam sumartana menyebutkan, paling tidak ada empat faktor penyebab kegagalan pendidikan agama dalam menumbuhkan pluralisme. Pertama, penekanannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; kedua sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari

sekedar sebagai “hiasan kurikulum” belakang, atau sebagai “pelengkap” yang dipandang sebelah mata; ketiga, kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar agama, seperti cinta, kasih sayang, Persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi; dan keempat kurangnya Perhatian untuk perhatikan untuk mempelajari agama-agama lain (Sumartana, 2001).

Melihat realitas tersebut, bahkan ditambah dengan adanya banyak konflik, kekerasan, dan bahkan kekejaman yang dijalankan atas nama agama, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya lah yang menjadi tujuan refleksi atas pendidikan agama adalah mampu melakukan transformasi kehidupan beragama itu sendiri dengan melihat Sisi Ilahi dan sosial-budayanya. Pendidikan agama harus mampu menanamkan cara hidup yang lebih baik dan santun kepada peserta didik. Sehingga sikap-sikap seperti saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman agama dan budaya dapat tercapai di tengah-tengah masyarakat plural.

#### ***B. Menciptakan pendidikan agama Islam yang berwawasan plural***

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangan karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan Kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan dengan diselaraskan terhadap perkembangan kebutuhan dunia usaha atau industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Konsep yang sekarang banyak di wacanakan oleh banyak ahli adalah kurikulum pendidikan berbasis pluralisme.

Sebagaimana disebut di atas bahwa konsep pendidikan pluralisme adalah pendidikan yang berorientasi pada realitas persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan. Pendidikan pluralisme digagas dengan semangat besar “untuk memberikan sebuah model pendidikan yang mampu menjawab tantangan masyarakat pasca modernisme”. Melihat realitas tersebut, maka di sinilah letak pentingnya menggagas pendidikan Islam

berbasis pluralisme dengan menonjolkan beberapa karakter sebagai berikut; *pertama* pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Artinya, di samping menunjukkan pendidikannya dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan, namun karakter keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Tentunya ini masih menjadi pertanyaan, Apakah sistem pendidikan seperti ini betul-betul mampu membongkar sakralitas ilmu-ilmu keagamaan dan dikhotomi keilmuan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan.

*Kedua*; pendidikan Islam juga harus mempunyai karakter sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk di dalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagaman. Kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang harus disadari oleh setiap peserta didik. Tentunya, kesadaran tersebut tidak lahir begitu saja ke manapun mengalami proses yang sangat panjang sebagai realitas pemahaman yang komprehensif dalam melihat suatu fenomena.

*Ketiga*; pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Sekolah memfasilitasi adanya “mimbar bebas”, dengan memberikan kesempatan kepada semua aktivitas untuk berbicara atau mengkritik tentang apa saja, asal bertanggung jawab. Tentunya, sistem demokrasi ini akan memberikan pendidikan pada siswa tentang realitas sosial yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda. Di sisi yang lain akan membudayakan “reasoning” bagi civitas di lembaga pendidikan Islam.

Perlunya membentuk pendidikan Islam berbasis pluralisme tersebut, sekali lagi merupakan suatu inisiasi yang lahir dari realitas sejarah pendidikan khususnya di Indonesia yang dianggap gagal dalam membangun citra kemanusiaan. Di mana umumnya, pendidikan umum hanya mencetak orang-orang yang pintar namun tidak mempunyai integritas keilmuan dan akhlaq ilmun. Ini yang kemudian melahirkan para koruptor yang justru menjadi penyakit dan menyengsarakan bangsa ini. Di satu sisi, pendidikan agama yang

ada hanya menciptakan ahli agama yang cara berpikirnya parsial dan sempit. Akhirnya, semakin banyak orang pintar ilmu agama semakin kuat pertentangan dan konflik dalam kehidupan. Inilah sistem pendidikan yang gagal dalam menciptakan citra kemanusiaan.

Untuk merealisasikan cita-cita pendidikan yang mencerdaskan seperti tersebut, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan sistem pengajaran yang berorientasi pada penanaman kesadaran pluralisme dalam kehidupan. Adapun beberapa program pendidikan yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran pluralisme adalah: pendidikan sekolah harus membekali para mahasiswa atau peserta didik dengan kerangka (*frame work*) yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya.

Karena masyarakat kita majemuk maka kurikulum PAI yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis satu dengan lain dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, perlu kiranya memperhatikan kurikulum sebagai proses. Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses ini yaitu; (1) posisi siswa sebagai subjek dalam belajar, (2) cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa, (4) lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Dalam konteks deskriptif ini kurikulum pendidikan mestilah mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultral dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan (S. H. Hasan, 2000).

Bentuk kurikulum dalam pendidikan agama Islam hendaknya tidak lagi ditujukan pada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, melainkan secara kolektif dan berdasarkan kepentingan bersama. Bila selama ini setiap siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka diusulkan agar lebih baik bila setiap siswa SMP-PT memperoleh materi agama

yang sama yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan untuk SD diganti dengan pendidikan budi pekerti yang lebih menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan dan kebaikan secara universal. Dengan materi seperti itu, di samping siswa dapat menentukan agamanya sendiri (bukan berdasarkan keturunan), juga dapat belajar memahami pluralitas berdasarkan kritisnya, mengajarkan keterbukaan, toleran tidak eksklusif, tapi inklusif (1999).

Amin Abdullah menyarankan “perlunya rekonstruksi pendidikan sosial keagamaan untuk memperteguh dimensi kontrak sosial keagamaan dalam pendidikan agama”. Dalam hal ini, kalau selama ini praktek di lapangan, Pendidikan Agama Islam masih menekankan Sisi keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri jadi materi pendidikan agama lebih berfokus dan sibuk mengurus urusan untuk kalangan sendiri (*individual* atau *private Affairs*). Maka, Pendidikan Agama Islam perlu direkonstruksi kembali agar lebih menekankan proses edukasi sosial, tidak semata-mata individual dan untuk memperkenalkan konsep *social contract*. Sehingga pada diri peserta didik tertanam suatu keyakinan, bahwa kita semua sejak semula memang berbeda-beda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, Iman, stredo, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan kepentingan kehidupan bersama, mau tidak mau, kita harus rela untuk menjalin kerjasama (*cooperation*) dalam bentuk kontrak sosial antar sesama kelompok warga masyarakat (Amin, 1996).

Pendek kata, agar maksud dan tujuan pendidikan agama Islam berbasis pluralisme dapat tercapai kurikulumnya harus didesain sedemikian rupa dan *favorable* untuk semua tingkatan dan jenjang pendidikan. Namun demikian, pada level sekolah dasar dan menengah adalah paling penting sebab pada tingkatan ini sikap dan perilaku peserta didik masih siap dibentuk. Dan perlu diketahui, suatu kurikulum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya keterlibatan pembuatan dan kerjasama secara langsung antara para pembuat kurikulum penulis *text book* dan guru.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk membuat kurikulum, *text book* dan guru untuk mengembangkan kurikulum PAI berbasis pluralisme di Indonesia, adalah sebagai berikut; *pertama*, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai

dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.

*Kedua*, teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, Moral, prosedur dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda.

*Ketiga*, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat bangsa dan dunia.

*Keempat*, proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan Siswa belajar individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antara individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

*Kelima*, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternatif assessment (portfolio, catatan, observasi, wawancara) dapat digunakan.

Di samping perlunya memperhatikan langkah-langkah itu, untuk menuju sebuah pai yang menghargai pluralisme, sebenarnya selain aspek kurikulum

yang harus didesain Sebagaimana telah menulis Uraikan, aspek pendekatan dan pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan atau pengajaran agama harus segera dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif. Aspek perbedaan harus menjadi titik tekan dari setiap pendidik. Pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan “manusia yang unik” (*human unique*), karena itu tidak boleh ada penyeragaman-penyeragaman. Dalam perspektif ini, pendidikan agama Islam yang memberikan materi kajian perbandingan agama dan nilai-nilai prinsip Islam seperti; toleransi, keadilan kebebasan dan demokrasi-untuk memperoleh suatu pemahaman di antara orang-orang yang berbeda iman itu-adalah sebuah keniscayaan.

Pendidikan Islam harus sadar, bahwa kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA seperti yang sering terjadi di Indonesia ini adalah akibat ekspresi keberagaman yang salah dalam masyarakat kita, seperti ekspresi keberagaman yang masih bersifat eksklusif dan monolitik serta fanatisme untuk memonopoli kebenaran secara keliru. Celakanya, ekspresi keagamaan seperti itu merupakan hasil dari “pendidikan agama”. Pendidikan agama dipandang masih banyak memproduksi manusia yang memandang golongan lain (tidak seakidah) sebagai musuh. Maka di sinilah perlunya menampilkan pendidikan agama yang fokusnya adalah Bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid pemain melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan.

Pendidikan agama, merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai atau aqidah inklusif pada peserta didik. Perbedaan agama di antara peserta didik bukanlah menjadi penghalang untuk bisa bergaul dan bersosialisasi diri. Justru pendidikan agama dengan peserta didik berbeda agama dapat dijadikan sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya masing-masing sekaligus dapat mengenal tradisi agama orang lain.

Target kurikulum agama Islam harus berorientasi pada akhlak. Bahkan Dalam pengajaran akidahnya, kalau perlu semua peserta didik disuruh merasakan jadi orang yang beragama lain atau atheis sekalipun. Tujuannya adalah bukan untuk konversi, melainkan dalam rangka agar mereka mempertahankan iman. Sebab, aqidah itu harus dipahami sendiri, bukan dengan cara taklid, taqlid tidakdibenarkan dalam persoalan aqidah. Selain itu pada masalah-masalah Syariah. Dalam persoalan Syariah, sering umat Islam juga

berbeda pendapat dan bertengkar. maka dalam hal ini pendidikan Islam perlu memberikan pelajaran “fiqih muqaran” untuk memberikan penjelasan adanya perbedaan pendapat dalam Islam dan semua pendapat itu sama-sama memiliki argumen dan wajib bagi kita untuk menghormati. Sekolah tidak menentukan salah satu mazhab yang harus diikuti oleh peserta didik, pilihan mazhab terserah kepada mereka masing-masing.

Melalui suasana pendidikan seperti itu, tentu saja akan terbangun suasana saling Menemani dalam kehidupan beragama secara dewasa, tidak ada perbedaan yang berarti diantara perbedaan manusia yang pada realitasnya memang berbeda. Tidak dikenal Superior ataupun inferior, serta memungkinkan terbentuknya suasana dialog yang memungkinkan untuk membuka wawasan spiritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan masing-masing.

Melalui pengajaran aqidah inklusif seperti itu tentu saja bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena hal itu adalah sesuatu yang absurd dan agak menghinai tradisi suatu agama. Yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. Setiap agama mempunyai sisi ideal secara filosofis Dan teologis, Dan inilah yang dibanggakan penganut suatu agama, serta yang akan menjadikan mereka tetap bertahan, jika mereka mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi real, ya itu suatu agama menyejarah dengan keagungan atau kesalahan-kesalahan yang biasa Dinilai dari sudut pandang sebagai sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog dalam Perbandingan Agama harus selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain yang hendak dibandingkan, dan realitas agama baik yang agung atau yang memalukan dengan realitas agama lain yang agung atau memalukan itu dengan demikian, akan dapat terhindar dari suatu penilaian standar ganda dalam melihat agama lain.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini ialah sebagai berikut; pertama, yakni ada 4 faktor penyebab kegagalan pendidikan agama dalam menumbuhkan pluralisme yaitu: 1) penekanannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; 2) sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai “hiasan kurikulum” belakang yang dipandang sebelah mata; 3) kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama, dan 4) kurangnya Perhatian untuk perhatikan untuk mempelajari agama-agama lain.

Pendidikan agama Islam, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agama peserta didik, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Maka, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh tentang isu pluralitas. Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun bentuk kurikulum pendidikan agama berbasis pluralisme agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin, N. (2013). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, A. (1996). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Baidhaw, Z. (2007). Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: An alternative for contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education*, 29(1), 15–30.
- Bano, N., Ahmad, H., Hassan, J., & Razaq, R. (2023). Principles of Religious Pluralism. *Religions*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/rel14010020>
- Cohen-Zada, D., & Elder, T. (2018). Religious pluralism and the transmission of religious values through education. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 150, 325–349. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.01.015>
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, R., & Ritonga, M. (2018). A study of religion education method with multicultural insight. *International Seminar On Islamic Education*.
- Hasan, N., Ikhwan, M., ICHWAN, M., Kailani, N., Rafiq, A., & Burdah, I. (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasan, S. H. (2000). Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26.
- Ichwan, M. N., & Muttaqin, A. (2013). *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan Festchrift untuk M. Amin Abdullah*. CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation) UIN Sunan ....
- Indrianto, N. (2020). *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Untuk Perguruan Tinggi*. Deepublish.
- Ishak, N., Ranaivo, R., & Manitra, M. (2022). Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1).
- Khisbiyah, Y. (2000). Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme. *dalam Sindhunata (ed.) Membuka*.
- Lindgren, B.-M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. *International journal of nursing studies*, 108, 103632.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moore, J. R. (2009). Why religious education matters: The role of Islam in multicultural education. *Multicultural Perspectives*, 11(3), 139–145.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa baru pendidikan Islam: Mengurai benang kusut dunia pendidikan*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

- Nugroho, P. (2019). Internalization of Tolerance Values in Islamic Education. *Nadwa*, 12(2), 197–228.
- Nuryanti, S. (2020). Populism in Indonesia: Learning from the 212 Movement in Response to the Blasphemy Case against Ahok in Jakarta. Dalam *Populism in Asian Democracies* (hlm. 165–175). Brill.
- Qurtuby, S. A. (2020). THE RISE OF ISLAMISM AND THE FUTURE OF INDONESIAN ISLAM. *Journal of International Studies*, 16, 105–128.
- Schulze, K. E. (2002). Laskar Jihad and the conflict in Ambon. *The Brown Journal of World Affairs*, 9(1), 57–69.
- Soekarba, S. R. (2018). The idea of pluralism in Indonesian society: A case study of Cirebon city as a cultural melting pot. *Journal of Strategic and Global Studies*, 1(1), 5.
- Sumartana, T. (2001). *Pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia*. Institut DIAN/Interfidei.
- Surikno, H. (2015). Pendidikan Agama Islam Berwawasan Pluralisme. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 3(1), 73–81.
- Sutiyono, S. (2015). Social Traditions and the Islamic Purification Movement in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(2 S1), Article 2 S1.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: Tinjauan kritis*. Gema Insani.
- Tolchah, M., & Mu'ammam, M. A. (2019). Islamic Education in the Globalization Era. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 1031–1037.
- van Bruinessen, M. M. (2018). Indonesian Muslims in a Globalising World: Westernisation, Arabisation and Indigenising Responses. *The RSIS Working Paper Series*, 311. <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/371380>
- Wahid, A. (2016). *Pluralisme Agama: Paradigma Dialog Untuk Mediasi Konflik dan Dakwah*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram.
- Walliman, N. (2021). *Research methods: The basics*. Routledge.

